



Pameran Peduli Air, Mal Kota Kasablanka



4

PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER
DAYA AIR IRIGASI KECIL (P4-ISDA- IK)

12

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
SEPANJANG TAHUN 2013

20

DITJEN SDA BERI PERHATIAN SANGAT SERIUS
UNTUK TANGANI BANJIR JAKARTA

air

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR



P4-ISDA-IK UNTUK MASYARAKAT

ISSN 1693-8003



9 771693 800383

Pembina

Djoko Kirmanto
 Mohamad Hasan • Mudjiadi
 Eko Subekti • Arie Setiadi
 Moerwanto • Pitoyo Subandrio
 • A. Hasanudin • Hartanto

Penanggung Jawab

Leonarda Ibnu Said

Pemimpin Umum

Ardhyta Agus Setiawan

Pemimpin Redaksi

Trinanda SP Sitorus

Redaksi

Tine Rosdiana •
 Kety Fillaily • Ersytra Tiara •
 Daswandi Budi Indra

Kontributor

Emir Faridz

Desain/Layout

M. Syaukani • Noor Cholis

TU/Sekretaris

Isbandiyah

Data

Nurullia Anjani •
 Dewi Anggraeni • Marsono

Foto/Dokumentasi

M. Syaukani • M. Kurdi
 • Sri Bagus Herutomo

Sirkulasi

Subbag TU Bina Program

Alamat Redaksi/TU

Seksi Komunikasi Publik
 Sub Direktorat Data dan Informasi
 Direktorat Bina Program
 Sumber Daya Air
 Gedung Direktorat Jenderal Sumber
 Daya Air dan Penataan Ruang
 Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7396616 pes. 515
 Fax. (021) 7210395
 e-mail: humassda@yahoo.com
 humassda@gmail.com

Diterbitkan oleh

Seksi Komunikasi Publik
 Sub Direktorat Data dan Informasi
 Direktorat Bina Program
 Sumber Daya Air
 Kementerian Pekerjaan Umum



EDITORIAL

Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang pro-rakyat, dibutuhkan upaya khusus selain program peningkatan jaringan irigasi dan program rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak, tentu saja akan berdampak kepada ketahanan ekonomi masyarakat. Salah satu program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum adalah dengan penanganan infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan melalui program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sumberdaya air melalui irigasi kecil atau dikenal dengan P4-ISDA-IK.

Program P4-ISDA-IK ini bertujuan untuk terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil berdasarkan prinsip kemandirian. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 328/KPTS/M/2013, tertanggal 12 Agustus 2013, yang diubah dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 396/KPTS/M/2013, tertanggal 4 oktober 2013, alokasi desa penerima program P4-ISDA-IK berjumlah 5010 desa dengan kriteria perbaikan jaringan irigasi/rawa kurang dari 1000 ha, perbaikan jaringan irigasi/rawa lebih dari 1000 ha pada petak tersier dan saluran/bangunan sekunder yang terkait, atau sawah tadah hujan yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi.

Program ini dilaksanakan dikarenakan tulang punggung utama dalam meningkatkan produksi pertanian adalah berada di petak tersier. Program ini melibatkan kerjasama antara kelompok tani mulai petani pengguna air hingga perangkat desa. Berangkat dari program inilah, pada edisi November-Desember ini kami mengangkatnya sebagai informasi utama.

Selain itu, kami juga mengulas evaluasi pencapaian kinerja program pengelolaan sumber daya air sepanjang tahun 2013 dan evaluasi pencapaian renstra tahun 2010–2014, serta liputan-liputan menarik lainnya.

Tahun 2013 akan segera berakhir, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam upaya penyebarluasan informasi bidang sumber daya air. Kami berusaha untuk terus membenahi diri dan meningkatkan kualitas kami dalam penyebarluasan informasi bidang sumber daya air ini. Pada kesempatan edisi kali ini kami mengucapkan selamat merayakan natal dan selamat tahun baru 2014. Menjadi lebih baik dan lebih informatif itu adalah misi kami di tahun 2014.



LAPORAN UTAMA

PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR IRIGASI KECIL (P4-ISDA-IK)

Realokasi anggaran dari pengurangan subsidi BBM juga digunakan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), yang mencakup Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM), dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA).



LAPORAN KHUSUS

DITJEN SDA SIAP *GROUND BREAKING* DAN RESMIKAN 24 PROYEK INFRASTRUKTUR SAMPAI DENGAN APRIL 2014

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) siap melakukan *groundbreaking*, *impoundment*, dan peresmian infrastruktur sumber daya air di berbagai daerah di Indonesia.



LAPORAN KHUSUS

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SEPANJANG TAHUN 2013

Pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, berlandas pada tiga pilar yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, yakni mengenai konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air.



LAPORAN KHUSUS

GROUND BREAKING JUFMP/JEDI

Program JEDI mulai dirancang ketika banjir di tahun 2007. Ada 6 titik yang ditangani oleh JEDI untuk mengatasi masalah banjir di kota. Program JEDI sebagian ditandatangani oleh Ditjen SDA dan sebagian paket lainnya ditandatangani oleh Ditjen Cipta Karya serta Pemerintah Provinsi DKI



FOKUS

DITJEN SDA BERI PERHATIAN SANGAT SERIUS UNTUK TANGANI BANJIR JAKARTA

Ada 13 sistem makro sungai di wilayah DKI Jakarta yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, Ditjen SDA telah menyiapkan 12 program Pengendalian Banjir di DKI Jakarta yang sebagian telah dimulai tahun 2012, dan keseluruhannya diharapkan selesai tahun 2017.



FOKUS

PENANDATANGANAN KONTRAK PEKERJAAN: PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG KE KANAL BANJIR TIMUR

Masalah banjir di Jakarta, terutama disebabkan oleh meluapnya kali Ciliwung, merupakan masalah yang dialami sebagian warga ibukota Jakarta dari tahun ke tahun. Di antara berbagai pekerjaan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dilaksanakan, pembangunan sudetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur menjadi salah satu upaya mencari solusi mengurangi banjir Jakarta.

LAPORAN UTAMA

- 4 Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK)

LAPORAN KHUSUS

- 8 Ditjen SDA Siap *Groundbreaking* dan Resmikan 24 Proyek Infrastruktur Sampai Dengan April 2014
- 12 Infrastruktur Sumber Daya Air Sepanjang Tahun 2013
- 16 *Groundbreaking* JUFMP/JEDI

PROFIL INFRASTRUKTUR

- 18 Waduk Muara Nusa Dua

FOKUS

- 20 Ditjen SDA Beri Perhatian Sangat Serius Untuk Tangani Banjir Jakarta
- 24 Penandatanganan Kontrak Pekerjaan: Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur
- 26 Penandatanganan Kontrak TA-BWRM WISMP-II: Lebih Fokus dan Aktif Dalam Mencapai Target

PERSPEKTIF

- 28 KNI-ICID Harus Berperan Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
- 30 Seminar Jaringan Telemetry Nasional Menghadapi Cuaca Ekstrem
- 32 Sosialisasi *Toolbox* IWRM (*Integrated Water Resources Management*) Kemitraan Air Indonesia (KAI) dan Peningkatan Kapasitas *Website* KAI

BERANDA

- 34 Delegasi APEC Summit 2013: Kunjungi Proyek Pengamanan Pantai di Bali
- 36 Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air
- 38 Kampanye Peduli Air: Bersama Menjaga Sungai

PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR IRIGASI KECIL (P4-ISDA-IK)



Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 masih memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekitar Rp. 193,8 Triliun atau 11.5% dialokasikan untuk subsidi BBM pada APBN 2013 dimana lebih dari 50% subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat kelas atas di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, maka kenaikan harga BBM sebagai salah satu kebijakan Pemerintah, perlu dikompensasikan terlebih kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena itu Pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak di tahun 2013. Kebijakan subsidi yang pro kepada masyarakat membutuhkan dilakukan dengan realokasi anggaran dalam APBN 2013.

Realokasi anggaran dari pengurangan subsidi BBM juga digunakan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), yang mencakup Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM), dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA).

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya air di daerah tertinggal, serta mengurangi potensi krisis air di daerah-daerah kantong kekeringan. Selain itu juga menurunkan tingkat kerawanan banjir dan abrasi pantai di kawasan pemukiman nelayan. Maksud program ini secara keseluruhan yakni memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di perdesaan dan perkotaan, serta meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat dengan dilibatkannya masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Program tersebut meliputi pembangunan sarana dan prasarana penyedia air baku untuk daerah rawan air. Target pelayanan mencakup sekitar 3,1 juta orang (dengan kapasitas sebesar 5,02 m³/detik) untuk 27 provinsi; dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung untuk daerah perdesaan di 26 provinsi; serta pembangunan pengaman pantai sepanjang 19 km dan normalisasi sungai di kampung nelayan di 2 provinsi.



P4-ISDA-IK UNTUK KEGIATAN REHABILITASI ATAU PERBAIKAN IRIGASI KECIL

Program Ketahanan Pangan Nasional yang dilakukan Pemerintah bersifat pro rakyat, oleh sebab itu membutuhkan suatu upaya khusus selain melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah. Salah satunya, penanganan infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber

Daya Air Irigasi Kecil yang disebut P4-ISDA-IK.

Tujuan pelaksanaan P4-ISDA-IK adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan prinsip kemandirian, seperti; terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil; terlaksananya rehabilitasi terhadap kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil; pengerukan sedimen (tanpa menggunakan alat berat) pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang; perbaikan lining sederhana yang berupa lining beton, pasangan batu, pasangan batu bata, atau bronjong pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang; memperbaiki tanggul pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang. Lainnya juga berupa perbaikan/ rehabilitasi bangunan air, bangunan bagi/ sadap pada jaringan irigasi primer (pada jaringan irigasi <1.000 ha), sekunder dan/atau tersier.

PELAKSANAAN P4-ISDA-IK

Total areal sawah di Indonesia saat ini mencapai 9,45 juta ha (BPS, 2010) yang dibagi menjadi beberapa bagian, sawah tadah hujan dan irigasi desa 1,47 juta ha (16%), Jaringan Irigasi Air Tanah 0,092 juta ha (1%), dan rawa lebak 0,172 ha (2%) serta rawa pasang surut 0,489 juta ha (5%).



Sedangkan untuk luas irigasi Indonesia secara keseluruhan mencapai 7,23 juta ha. Kewenangan irigasi di Indonesia dibagi menjadi tiga kewenangan, yaitu Kabupaten/Kota seluas 3.419.91 ha (48%), Pusat 2.351.000 ha (32%), dan Kewenangan Provinsi 1.423.222 ha (20%).

Untuk mendukung ketahanan pangan dan surplus 10 juta ton beras di tahun 2014, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melaksanakan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK)

Salah satu bentuk kegiatan pelaksanaan P4-ISDA-IK adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Rehabilitasi jaringan irigasi secara partisipatif merupakan suatu wujud pemberdayaan masyarakat tani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan mulai dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

“Program P4-ISDA-IK dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat tani dalam rehabilitasi jaringan irigasi secara

partisipatif di wilayah pedesaan,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moh. Hasan dalam acara Workshop P4-ISDA-IK, Yogyakarta (12/13).

Tujuan dari pelaksanaan P4-ISDA-IK adalah terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil dan terlaksananya rehabilitasi terhadap kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil.

Dalam menjalankan program P4-ISDA-IK tentu saja ada regulasi hukumnya, seperti Undang-undang Sumber Daya Air Pasal 41 Ayat 1–6, Pasal 70 Ayat 1–4, dan Pasal 78 Ayat 3. Dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, Pasal 16 Ayat 1 Huruf K, Pasal 20, Pasal 26 Ayat 1–5, Pasal 27, Pasal 28 Ayat 1–7, Pasal 49 Ayat 2 dan 4, Pasal 52 Ayat 4, Pasal 57, Pasal 63 Ayat 4, dan Pasal 74 Ayat 4 serta Pasal 78 Ayat 2.

Ada beberapa prinsip P4-ISDA-IK, yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan. Indikator dari pelaksanaan P4 ISDA IK adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi dan meningkatnya kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tani.

Dalam pelaksanaan Program P4-ISDA-IK ini dibentuk tim teknis dari pusat (TTP) dan selanjutnya dibantu oleh tim pelaksana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah

Sungai (BWS) yang mempunyai tugas dalam bidang koordinasi dan teknis (validasi dan supervisi) dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran dana bantuan sosial P4ISDA IK.

Moh. Hasan mengatakan pengelolaan P4-ISDA-IK akan melibatkan berbagai unsur pelaksanaan yang berjenjang dari tingkat pusat, wilayah sungai, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat desa.

Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 396/KPTS/M/2013 tanggal 4 Oktober 2013, total desa yang menerima dana bantuan sebanyak 5.010 desa. Dana yang diberikan untuk setiap desa sebesar Rp 178 juta digunakan untuk pelaksanaan fisik Rp 175 juta dan biaya operasional kegiatan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Rp 2,5 juta.

Kegiatan fisik yang dilakukan diantaranya adalah pengerukan sedimen (tidak menggunakan alat berat) pada saluran pembawa dan saluran pembuang, perbaikan tanggul pada saluran pembawa atau saluran pembuang, dan perbaikan/rehabilitasi bangunan air, bangunan sadap pada jaringan irigasi primer (pada jaringan irigasi <1.000 ha) sekunder atau tersier. Penyerahan bantuan P4-ISDA-IK diberikan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani



Pemakai Air (IP3A) yang telah berbadan hukum.

Moh. Hasan menambahkan P3A, GP3A dan IP3A yang menerima dana bantuan selain berbadan hukum, juga harus memiliki Surat Keputusan (SK) yang disahkan oleh Kepala Daerah dan disahkan dengan Akte Notaris serta diketahui oleh Kepala BBWS dan BWS.

H. Munawar selaku KPM Daerah Irigasi Balong, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, mengatakan bahwa pihaknya sangat diuntungkan dengan adanya program P4-ISDA-IK ini, karena selain dapat meningkatkan produksi padi, dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong untuk kepentingan bersama guna mensejahterakan mereka (petani).

Dalam kunjungannya ke Karawang pada 16 Oktober 2013, Moh. Hasan mengatakan pelaksanaan P4-ISDA-IK setiap kelompok P3A mampu menuntaskan kegiatan P4-ISDA-IK dengan baik. Sebab terlaksananya P4-ISDA-IK sangat bergantung pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil tersebut. "Pemerintah akan membantu secara langsung rehabilitasi prasarana irigasi di mana pelaksanaannya akan diswadayakan kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan tentu untuk



meningkatkan produksi pertanian serta pendapatan dan perekonomian peserta," ujar Moh. Hasan.

Para petani di Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang berharap agar irigasi utama yang berada di desanya segera diperbaiki dan direhabilitasi agar distribusi air tidak terhambat. Sampai saat ini, Desa Kalisari telah memproduksi padi ± 6 ton per hektar.

P4-ISDA-IK DI BERBAGAI PROVINSI

Pelaksanaan P4-ISDA-IK diutamakan pada 15 provinsi lumbung beras, yang memiliki kontribusi pada ± 90 persen produksi padi nasional tahun 2012, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada tahun 2012, berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, produksi Gabah Kering Giling (GKG) Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.368.390 ton. Kemudian di tahun 2013, ditargetkan mencapai 2.512.172 ton GKG.

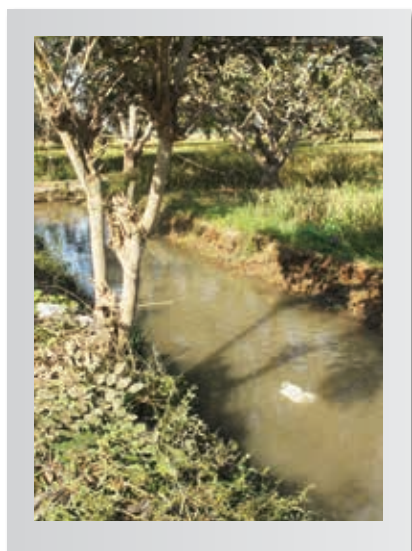
Di tahun 2012, luas areal panen mencapai 476.422 hektar. Sementara di tahun 2013, luas areal panen ditargetkan meningkat menjadi 485.4331 hektar dan di tahun 2014 ditargetkan mencapai 492.251 hektar.

Kepala KPM di Jorong Koto Tinggi, Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Zulhendri, mengatakan bahwa areal persawahan di Ranah Minang umumnya merupakan tanah adat. "Di Jorong Koto Tinggi, persawahan umumnya tanah adat walaupun kepemilikan lahan beralih ke orang lain namun fungsinya tidak akan berubah," ujar Zulhendri.

Pelaksanaan P4-ISDA-IK di Sumatera Barat didukung oleh Daerah Irigasi (DI) Batang Anai Tahap II yang saat ini masih dalam tahap pembangunan berlokasi di empat kecamatan, yaitu Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris (Kabupaten Padang Pariaman) dan Pariaman Selatan (Kota Pariaman).

Pembangunan DI Anai Tahap II merupakan kelanjutan dari irigasi Anai I yang meliputi Kecamatan Lubuk Alung dan Batang Anai. Total luas areal persawahan yang dapat diairi dari kedua irigasi Anai I dan II mencapai 13.604 hektar.

Pembangunan DI Batang Anai Tahap II dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Menurut Kepala BWS Sumatera V, Adek Rizaldi, disampaikan bahwa pembangunan DI Batang Anai II dilaksanakan untuk mendukung pengairan persawahan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang airnya bersumber dari Sungai Batang Anai, yang nantinya setelah operasional mampu melayani persediaan air bagi 6.840 hektar sawah di kabupaten Padang Pariaman serta kota Padang. (*idr/anj/tin/nan*)



DITJEN SDA SIAP GROUNDBREAKING DAN RESMIKAN 24 PROYEK INFRASTRUKTUR SAMPAI DENGAN APRIL 2014



Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) siap melakukan *groundbreaking*, *impoundment*, dan peresmian infrastruktur sumber daya air di berbagai daerah di Indonesia. Total sebanyak 24 pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur yang diagendakan sepanjang Desember 2013 sampai dengan April 2014, dengan detail 18 *groundbreaking*, 5 *impoundment*, dan 3 peresmian.

Groundbreaking sendiri adalah peletakan batu pertama pondasi sebuah bangunan atau infrastruktur. Peletakan batu pertama ini adalah sebuah simbol dimulainya pembangunan sebuah proyek infrastruktur.

Ditjen SDA merencanakan *groundbreaking* sebanyak 11 proyek infrastruktur di kawasan barat Indonesia. di Provinsi Jawa Timur direncanakan *groundbreaking* 4 waduk, yaitu Waduk Bendo, Waduk Tukul, Waduk Gongseng, dan



Bendungan Tugu. Untuk DKI Jakarta, groundbreaking dilakukan untuk proyek Normalisasi Kali Ciliwung dan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. *Groundbreaking* di Banten akan dilaksanakan untuk proyek pembangunan Bendungan Karian, sementara di Jawa Tengah akan dilaksanakan untuk proyek Bendungan Logung dan Waduk Gondang. Di Sumatera, *groundbreaking* akan dilakukan untuk *Jambi Flood Control* di Jambi dan Pembangunan Bendung Gerak Jabung di Lampung.



Groundbreaking pembangunan Bendung Teritip di Kalimantan Timur adalah salah satu proyek infrastruktur berikutnya dikawasan Tengah Indonesia, diikuti dengan Bendung dan Jaringan Irigasi Tallung Ura di Sulawesi Selatan, Bendung Karalloe di Sulawesi Selatan, Bendung Randangan di Gorontalo serta Bendung Pengalih Rababaka dan Saluaran *Inter basin* untuk Bendungan Tanjung dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk kawasan timur Indonesia, Ditjen SDA menrencakan *groundbreaking* untuk Bendung Wariori di Papua Barat, dan Bendung pada Daerah Irigasi Akelamo di Maluku Utara.



Untuk *impoundment*, Ditjen SDA berencana melakukan *impoundment* terhadap lima waduk, yaitu Waduk Jatibarang di Jawa Tengah, Waduk Nipah di Madura, Waduk Jatigede di Sumedang, serta Waduk Paya Seunara dan Bendungan Rajui di Aceh.



Impoundment merupakan pengisian waduk bendungan dengan menutup pintu bendungan untuk mengurung air.

Impoundment sebagai tahap akhir pembangunan akan diteruskan dengan peresmian, untuk peresmian proyek infrastruktur, Ditjen SDA berencana untuk meresmikan Waduk Jatibarang dan Normalisasi Kali Garang di Jawa Tengah serta Embung Sebatik di Kalimantan Timur. **(idr)**

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SEPANJANG TAHUN 2013



Pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, berlandas pada tiga pilar yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, yakni mengenai konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air. Hal ini berupa antara lain, pengelolaan daerah tangkapan air, juga pengelolaan jaringan sumber daya air beserta penyediaan infrastrukturnya.

Infrastruktur yang dibangun berupa bendungan, yang merupakan salah satu infrastruktur, dibangun dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Yang lainnya adalah saluran irigasi, yang merupakan infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan/bendung/embung kepada lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya saluran irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah/ladang para petani akan terjamin.



Tiga fokus pokok dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, pula dilakukan di sepanjang tahun 2013, berupa dukungan terhadap ketahanan pangan, konservasi dan penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air, yang ditandai dengan berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir.

Pencapaian kerja di bidang sumber daya air, dapat dilihat melalui kegiatan pembangunan waduk yang ditujukan sebagai suplai kebutuhan air untuk irigasi, air baku, serta mengurangi banjir. Sampai dengan tahun 2013, total waduk yang telah dibangun sejumlah 286 buah waduk serta 1.221 embung dengan rincian tiap periode antara lain;

Pada periode delapan tahun, dari tahun 2005–2013, jumlah waduk yang dibangun lebih banyak, akan tetapi mempunyai daya tampung yang lebih kecil. Hal ini dalam rangka pemerataan penyediaan air baku di beberapa wilayah di Indonesia.



Sementara itu, di periode 2010–2013 telah dibangun 11 buah waduk dengan kapasitas 4,57 juta m³, yaitu Gonggang (di provinsi Jawa Timur), dengan kapasitas tampung 1,93 juta m³, dan Rajui (provinsi Aceh) dengan kapasitas tampung 2,64 juta m³.

Hingga saat ini, sedang berlangsung konstruksi tujuh buah waduk yang dimulai sejak tahun 2010, yaitu Jatigede di Jawa Barat, Jatibarang di Jawa Tengah, Bajulmati dan Bendo di Jawa Timur, Marangkayu di Kalimantan Timur, Titab di Bali serta Pandanduri di Nusa Tenggara Barat.

Sehingga, selama periode tahun 2005–2009, embung yang telah dibangun sebanyak 100 buah. Sementara itu, untuk pembangunan embung, di tahun 2010 hingga 2013, telah terbangun 312 buah embung.



Berkaitan dengan infrastruktur sumber daya air dalam upaya untuk menanggulangi daya rusak air, telah dibangun sepanjang total 49,8 km kanal banjir di berbagai provinsi hingga tahun 2013. Kanal banjir yang telah dibangun dalam periode tahun 2010–2013 adalah 32,9 km, yang meliputi kanal banjir timur Jakarta sepanjang 23,6 km yang selesai di tahun 2011, serta kanal banjir Semarang sepanjang 9,3 km yang selesai di tahun 2012. Pembangunan kanal banjir timur Jakarta dapat mengurangi genangan dan melindungi area 13 kawasan permukiman, kawasan industri dan perdagangan, serta melindungi wilayah seluas 270 km² di timur bagian utara DKI Jakarta. Lebih lanjut, kanal banjir Semarang bermanfaat untuk melindungi area sekitar dari banjir seluas 200 Ha.





Hal lainnya adalah pembangunan sarana sungai, ditujukan untuk melindungi masyarakat sekitar sungai dari luapan air sungai. Sampai tahun 2013, telah dilakukan pembangunan prasarana sungai dengan total sepanjang 2.081 km. Salah satunya adalah pembangunan dinding penahan banjir sepanjang 15,6 km di kabupaten Serang, provinsi Banten, yang telah dilaksanakan pada tahun 2012.

Kegiatan pembangunan jaringan irigasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan irigasi ke area pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Sampai tahun 2013, telah dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi mencapai luas 2,315 juta ha (yang menjadi kewenangan pusat), 1,423 juta ha (yang merupakan kewenangan provinsi), dan 3,491 juta ha (merupakan kewenangan kabupaten/kota). **(nan/ech)**



GROUNDDBREAKING JUFMP/JEDI



Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane melaksanakan *Groundbreaking* pekerjaan *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)* atau *Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Package 2A: Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway* dan *Pakage 2B: Dredging and Embankment of Lower Sunter Floodway*.

“Program JEDI mulai dirancang ketika banjir di tahun 2007. Ada 6 titik yang ditangani oleh JEDI untuk mengatasi masalah banjir di kota. Program JEDI sebagian ditandatangani oleh Ditjen SDA dan sebagian paket lainnya ditandatangani oleh Ditjen Cipta Karya serta Pemerintah Provinsi DKI,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan, dalam *Groundbreaking JUMFP 2A: Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway* dan *Package 2B: Dredging and Embankment of Lower Sunter Floodway* (21/11), Jakarta.



Pekerjaan JUMFP dikerjakan oleh PT. Adhi Karya, PT. Utama Karya, dan PT. Jaya Konstruksi (*joint venture*). Pekerjaan *Package 2A: Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway* mendapatkan dana dari *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) Loan* sebesar Rp 209,8 miliar. *Cengkareng Floodway* memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 459 km², panjang sungai utama 7,9 km, panjang sungai yang ditangani 7,8 km, lebar sungai 60–70 m, debit eksisting 300–340 m³/det, volume

galian 1.624 m³, dan penguatan tebing 4,6 km.

Sedangkan untuk *Package 2B: Dredging and Embankment of Lower Sunter Floodway* dikerjakan oleh PT. Utama Karya. Sumber dana dari *IBRD Loan* sebesar Rp 65,25 miliar. Luas DAS yang dikerjakan 34 km², panjang sungai utama 15,3 km, panjang sungai yang ditangani 9,98 km, lebar sungai 20–45 m, kapasitas air eksisting 65 m³/det, volume galian 399,250 m³, dan perkuatan tebing 1,80 km.

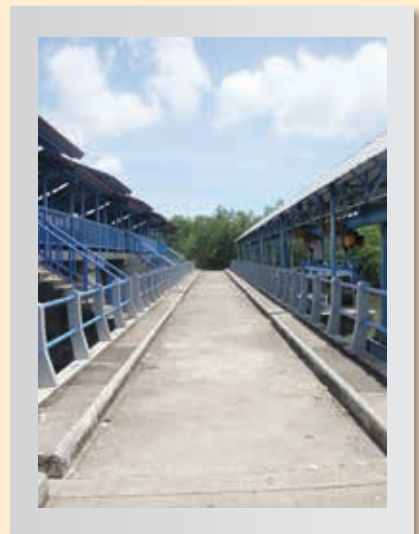
Imam Santoso selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane (Cilicis) pada saat itu, mengatakan bahwa pekerjaan bertujuan untuk mengembalikan kapasitas sungai di muara dengan melakukan *dredging* yang diharapkan dapat mengurangi banjir di daerah hulu yang disebabkan oleh pendangkalan. **(ech/tin)**



WADUK MUARA NUSA DUA



Waduk Muara Nusa Dua terletak di muara Tukad Badung tepat di hilir jembatan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar. Dibangun untuk menyediakan air baku guna memenuhi kebutuhan air bersih sampai dengan saat ini telah di bangun seluas 35 Ha (selesai pembangunan pada tahun 1995/1996) dan telah dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan air bersih di kawasan Nusa Dua dan Kuta sebesar 300 lt/dt.





Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya di wilayah Badung Selatan dan kawasan Kuta yang berpengaruh langsung pada keandalan penyediaan kebutuhan air bersih, maka sangat dibutuhkan upaya optimalisasi manfaat waduk muara atau upaya untuk mempertahankan keberadaan manfaat Waduk Muara Nusa Dua.

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan selama 3 tahun yang mulai dilaksanakan pada Juni 1993 dengan menggunakan biaya Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dan loan dengan jumlah total Rp 17 miliar. *(anj/idr/nan)*

DATA TEKNIS

• Catchment Area	: 37,70 Km ²
• Luas genangan	: 35.00 ha
• Elevasi muka air di spillway	: 1,65 m
• Elevasi di bendungan karet	: 1,70 m
• Volume tampungan	: 420.000 m ³ (Air Melimpah)
• Kapasitas untuk air baku	: 300 l/dt
• Output debit rata-rata	: 260 l/dt
• Inflow air ke waduk minimal	: 0,53 m ³ /dt
• Inflow air ke waduk maksimal	: 1,39 m ³ /dt
• Pengambilan dari PDAM	: 300 l/dt
• Panjang bendungan	: 3,10 km
• Elevasi pasang air laut muka	: 0,90 m



DITJEN SDA BERI PERHATIAN SANGAT SERIUS UNTUK TANGANI BANJIR JAKARTA



Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane memberikan perhatian yang sangat serius dan prioritas tinggi terhadap penanganan dan pengendalian banjir di DKI Jakarta. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penanganan banjir di Indonesia saat ini, seperempatnya atau sekitar Rp 1,3 triliun ditujukan bagi pengendalian banjir di DKI Jakarta. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohamad Hasan di hadapan sejumlah wartawan dalam Jumpa Pers, di Jakarta, (25/11).

“Ada 13 sistem makro sungai di wilayah DKI Jakarta yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, Ditjen SDA telah menyiapkan 12 program Pengendalian Banjir di DKI Jakarta yang sebagian telah dimulai tahun 2012, dan keseluruhannya diharapkan selesai tahun 2017. Anggaran yang dikucurkan untuk program ini adalah sekitar Rp 12 triliun untuk biaya pembebasan lahan dan sekitar Rp 13,1 triliun untuk biaya konstruksi,” ujar Mohamad Hasan.

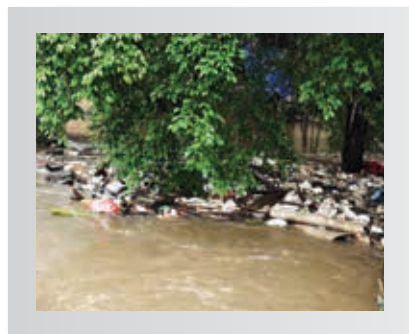


Beberapa program yang telah selesai saat ini adalah peningkatan kapasitas Banjir Kanal Barat dengan biaya konstruksi Rp 350 miliar dan peningkatan kapasitas Kanal Banjir Timur (KBT) yang menghabiskan biaya konstruksi Rp 2,42 triliun.

Sementara program yang saat ini tengah dilaksanakan antara lain normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter dengan biaya konstruksi Rp 2,29 triliun; normalisasi Kali Ciliwung yang meliputi penambahan Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet senilai Rp 218,1 miliar, dan normalisasi Kali Ciliwung Lama senilai Rp 241,3 miliar; rehabilitasi Pompa Pluit senilai Rp 160 miliar; serta revitalisasi situ-situ dan dam parit dengan biaya konstruksi senilai Rp 500 miliar, dimana keseluruhan pekerjaan dilakukan dalam tahun jamak yang ditargetkan selesai pada tahun 2014.

Mohamad Hasan juga membeberkan program yang saat ini sedang berada dalam tahap lelang dan perencanaan, yaitu Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Cengkareng Drain, Sunter Hilir, Simatupang; pembangunan Sudetan Ciliwung ke KBT; normalisasi Kali Krukut; normalisasi Kali Cipinang Hulu; pembangunan Waduk Ciawi; dan pembangunan check dam dan sumur resapan.

Namun Mohamad Hasan mengingatkan bahwa penanganan pengendalian banjir Jakarta yang bersifat struktural tersebut tidak menjamin Jakarta akan terbebas sepenuhnya dari banjir. Penanganan banjir ini juga harus dibarengi dengan penanganan bersifat non struktural seperti penanganan sampah. Hasan mengakui saat ini waste management di masyarakat belum cukup baik. "Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengenai penanganan sampah ini. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan," tutur Hasan.



Dalam kesempatan yang sama, Mohamad Hasan menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas penanganan masalah sistem koordinasi, pembebasan lahan dan masalah sosial yang timbul dari program pengendalian banjir di Jakarta. "Saya melihat keseriusan Pemprov DKI Jakarta yang berupaya keras melakukan perbaikan sistem



mikro drainase perkotaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI. Hal ini penting dilakukan mengingat jika kondisi sistem kondisi buruk, air tidak akan bisa mengalir ke sistem makro, sehingga dapat menyebabkan terjadinya genangan lokal. Jadi penanganan sistem makro dan mikro ini harus berjalan berdampingan," pungkas Hasan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar menyampaikan kemajuan pekerjaan yang sedang dilakukan untuk Tahun Anggaran 2012-2014. Pekerjaan tersebut antara lain penggantian East Pump Pluit, perbaikan tanggul dan pembuatan rumah pompa dengan progress 65,30 persen; penambahan daun Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet di Kanal Banjir Barat dengan progress 60 persen; normalisasi Kali Angke dengan progress 66,16 persen; normalisasi Kali Pesanggrahan dengan progress 59,10 persen; normalisasi Kali Sunter dengan progress 64,89 persen; serta revitalisasi Kali Ciliwung Lama dengan progress 62,35 persen. **(idr/tin)**





YOGYAKARTA

Lokasi

Daerah Irigasi
Balong,
Desa Trirenggo
Kecamatan Bantul
Kabupaten Bantul

Dana

Rp 178.000.000,-

PROGRA PERCEPAT DAN PERLUAS PEMBANGUN INFRASTRUKT

SUMATERA BARAT

Lokasi

Nagari Pandai Sikek,
Kabupaten Tanah
Datar, Sumatera
Barat

Dana

Rp 178.000.000,-

KARAWANG

Lokasi

Desa Kalisari
Kecamatan Telagasari
Kabupaten Karawang

Dana

Rp 178.000.000,-



Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air-Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK) dilaksanakan di beberapa desa di Indonesia yang totalnya mencapai 5.010 desa yang sesuai dengan Keputusan Menteri No. 396/KPTS/M/2013.

KALIMANTAN

Lokasi

Daerah Irigasi Kayutanam
Kecamatan Mandor
Kabupaten Landak,
Provinsi Kalimantan Barat

Dana

Rp 178.000.000,-



PENANDATANGANAN KONTRAK PEKERJAAN

PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG KE KANAL BANJIR TIMUR



Masalah banjir di Jakarta, terutama disebabkan oleh meluapnya kali Ciliwung, merupakan masalah yang dialami sebagian warga ibukota Jakarta dari tahun ke tahun. Di antara berbagai pekerjaan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dilaksanakan, pembangunan sudetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur menjadi salah satu upaya mencari solusi mengurangi banjir Jakarta. Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane siap melaksanakan pekerjaan pembangunan, yang dimulai dengan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, serta Supervisi Pembangunan dan Manajemen Konstruksi, yang turut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (19/12).

Upaya penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta tercakup dalam wilayah kerja BBWS Ciliwung Cisadane. Oleh karena itu, pekerjaan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung adalah bagian dari usaha pengendalian daya rusak air yang merupakan tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sudetan yang nanti akan dikerjakan pembangunannya adalah saluran/ terowongan air dengan kapasitas minimal 60 m³/det, yang mengalirkan sebagian debit air kali Ciliwung di saat banjir ke Kanal Banjir Timur, dengan memperhitungkan kapasitas sistem Kanal Banjir Timur, sehingga tidak memindahkan masalah banjir ke wilayah lainnya.

Dilaporkan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, T. Iskandar, bahwa pembangunan ini merupakan pekerjaan tahap I dengan metode Kontrak Rancang dan Bangun (Desain dan Build), dengan jangka waktu 2 tahun anggaran atau persis selama 430 hari kalender, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi pekerjaan pembuatan saluran/ terowongan air sepanjang 1,27 km. Sementara itu, untuk tahap II, akan meliputi pekerjaan pembangunan inlet dan outlet dan normalisasi kali Cipinang, yang pelaksanaannya setelah pembanguna tahap I selesai.



Pelaksana Pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah Rp 493 M ini adalah PT. Wijaya Karya (Persero). Sedangkan, nilai kontrak sejumlah Rp 8,573 M dilaksanakan oleh PT. Indra Karya (Persero) yang bertindak sebagai konsultan supervisi. Untuk melaksanakan kegiatan manajemen konstruksi, akan dikerjakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) dengan nilai kontrak sejumlah Rp 5,774 M.

"Kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk

kelancaran pekerjaan ini", demikian dikatakan Iskandar. Di tempat yang sama, dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, mengingatkan agar jangan sampai ada keterlambatan sedikit pun dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Berkaitan dengan masalah pembebasan lahan, "semua masalah lahan harus kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta," himbau Menteri PU. **(nan/anj)**



PENANDATANGANAN KONTRAK TA BWRM WISMP-II

LEBIH FOKUS DAN AKTIF DALAM MENCAPAI TARGET



Program *Water Integrated System Management Program* (WISMP) II merupakan lanjutan dari program WISMP-I yang pendanaannya dalam bentuk *loan* dari World Bank. Pengadaan mulai dilaksanakan pada Januari 2012 dengan melalui proses panjang yang akhirnya selesai pada November 2013 dengan diterbitkannya surat Penetapan dari Menteri Pekerjaan Umum.

Pelaksanaan WISMP II merupakan sarana menuju pengelolaan sumber daya air secara terpadu di 18 wilayah sungai. "Ada beberapa sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan Komponen-1, salah satunya adalah pengelolaan Sumber Daya Air di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Bina Penatagunaan Sumber Daya Air yang terdiri dari hidrologi, kualitas air, alokasi air, Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA), pengelolaan sungai dan pengelolaan banjir," ujar Direktur

Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Moh. Hasan, dalam acara Penandatanganan Kontrak Tahun Anggaran (TA) *Basin Water River Management* (BWRM) WISMP-II (12/11), Jakarta.

Pembinaan kegiatan Komponen-1 meliputi perkuatan institusi dan wadah koordinasi, hidrologi, kualitas air, alokasi air, data dan informasi, pengelolaan banjir, pengelolaan infrastruktur sungai dan *management asset*. Pembina Komponen-1 yang sesuai dengan SK Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang terdiri dari beberapa Sub Direktorat (Subdit), yaitu Subdit Perencanaan Wilayah Sungai, Subdit Hidrologi dan Kualitas Air, Subdit Perencanaan Teknik Sungai Pantai, Subdit OP Sungai Pantai, Subdit Perencanaan OP, subdit Penanggulangan Bencana, dan Subdit Program dan Anggaran serta Subdit KLN.



Moh. Hasan mengatakan, "tugas Konsultan bersifat *task concept* dan *assist concept*, yaitu tugas yang harus dilakukan oleh konsultan, meliputi pendampingan pelatihan, penyusunan atau *review modul* dan penyusunan pedoman-pedoman". Disampaikannya lebih lanjut, "sedangkan untuk *assist concept* adalah kegiatan konsultan dalam membantu secara rutin dalam pelaksanaan operasional di Pusat dan Daerah serta membantu pembentukan kelompok kerja disetiap Komponen-1." Jumlah alokasi dana Komponen-1 sebesar USD 41,32 juta dan untuk TA-BWRM sebesar USD 4,2 juta. Setelah negosiasi, dana TA-BWRM sebesar USD 3,6 juta. Pemenang untuk pelaksanaan Komponen-1



adalah PT. Virama Karya Joint Venture Egis EAU, PT. Caturbina Guna Persada, PT. Geo Issec, PT. Kwarsa Hexagon, dan PT. Inakko Internasional Konsulindo.

Moh. Hasan mengingatkan perlunya melaksanakan koordinasi rutin antara konsultan TA-BWRM dengan *National Project Implementing Unit* (NPIU) PSDA, *Province Project Implementing Unit* (PPIU) Provinsi dan *Project Implementing Unit* (PIU) BBWS dan

BWS serta *counterpart* pada masing-masing kegiatan. Selain itu, konsultan TA-BWRM diharapkan lebih fokus dan aktif dalam mempercepat langkah pencapaian target.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mudjadi, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto dan Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio. **(anj/nan)**



KNI-ICID HARUS BERPERAN DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL



Komite Nasional Indonesia—*International Commision on Irrigation and Drainage* (KNI-ICID) kembali menggelar kongres dan rapat anggota tahunan sekaligus seminar nasional di Semarang (29/11). Rangkaian acara ini salah satunya diselenggarakan sebagai ajang seleksi *paper* dari Indonesia yang akan dipresentasikan pada pertemuan ICID di Gwangju, Korea.

Seminar mengambil tema “*Securing Water for Food and Rural Community Under Climate Change*” di mana pemilihan tema didasari pada banyaknya penulis potensial dari lingkungan KNI-ICID. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan minat generasi muda KNI-ICID dalam menyiapkan dan mengkomunikasikan tulisannya di forum-forum internasional maupun regional ICID mendatang. Ada dua sub tema yang dibahas dalam seminar, yaitu “*How Irrigation and Drainage Play an Important Role in Climate Change Adaptation?*” dan “*How do Irrigation and Drainage Interventions Secure Food Production and Livelihood For Rural Community?*”

Dalam acara tersebut disampaikan program-program kerja KNI-ICID 2011-2016 yang telah dan akan dilaksanakan. Program-program tersebut meliputi pembinaan organisasi, kegiatan komisi, kerjasama antar lembaga, partisipasi pada pertemuan ICID tingkat internasional. Serta dukungan terhadap kegiatan nasional maupun regional bidang sumber daya air dan irigasi.

Guna lebih meningkatkan peran aktif komite-komite provinsi, KNI-ICID Pusat menugaskan beberapa komite provinsi untuk bertindak sebagai *vocal point* dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan KNI-ICID. Komite ICID Sumatera Selatan ditunjuk sebagai *vocal point* pengelola rawa, komite ICID Jawa Barat sebagai *vocal point* pengelolaan kualitas air, Komite ICID di Yogyakarta sebagai *vocal point* pengembangan partisipasi masyarakat, komite ICID Jawa Timur sebagai *vocal point* adaptasi perubahan iklim, komite ICID Nusa Tenggara Barat sebagai *vocal point* irigasi, dan komite ICID Jawa Tengah sebagai *vocal point* kerjasama pengelolaan sumber daya air.

Dalam rangkaian acara itu, Ketua Umum KNI-ICID, Mohamad Hasan, juga melakukan pengukuhan Pengurus Komite ICID Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016. Mohamad Hasan meminta pengurus yang baru dikukuhkan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan dengan profesionalisme yang tinggi.

Mohamad Hasan dalam sambutannya meminta KNI-ICID harus dapat berperan dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional. "Dalam



pengelolaan kebijakan penanganan irigasi tidak hanya dibutuhkan unsur birokrat sebagai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan irigasi, tapi juga harus ada peran praktisi profesi bidang irigasi, dan akademisi yang memberi masukan bagaimana mengelola kebijakan penanganan irigasi. Disinilah ICID dapat mengambil peran," ujar Mohamad Hasan.

Lebih lanjut Mohamad Hasan mengatakan irigasi berperan penting dalam ketahanan pangan nasional khususnya beras. Produksi beras nasional saat ini berasal dari sawah beririgasi. Karena itu sangat penting dalam mempertahankan perut bangsa. Irigasi adalah soko guru terhadap ketahanan perut bangsa.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kanal Banjir Barat Kota Semarang, antara Direktur

Jenderal Sumber Daya Air Mohamad Hasan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Semarang Hendar Prihadi. Penandatanganan naskah kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan Kanal Banjir Barat secara terpadu dan berkelanjutan di Semarang, tercapainya kelestarian fungsi sungai di Kanal Banjir Barat.

Pelaksanaannya sendiri akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan SKPD terkait berdasarkan bidang dan tugas fungsinya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pengurus Anggota KNI-ICID Pusat dan Daerah se-Indonesia, Dewan Pakar KNI-ICID, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum, para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air se-Jawa Tengah, dan sesepuh KNI-ICID. (*idr/anj*)



SEMINAR JARINGAN TELEMETRING NASIONAL MENGHADAPI CUACA EKSTRIM



Pemerintah dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu sesuai amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah membentuk Organisasi Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Balai Wilayah Sungai.

"Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dan dilaksanakan Sistem Informasi Sumber Daya Air tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan jejaring pengelolaan hidrologi yang ada serta jejaring *telemetry* Nasional yang sedang dibangun agar memperoleh informasi yang akurat dan berkesinambungan," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara Pengukuhan

Pengurus Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) Periode 2013–2016 dan Seminar Jaringan *Telemetering* Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Cuaca dan Iklim Ekstrem, Jakarta (12/13).

Informasi tersebut merupakan karakteristik dari potensi sumber daya air yang berada pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS). Data hidrologi diperoleh dari setiap stasiun pengamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dianalisis untuk mendapatkan informasi hidrologi mengenai besaran debit dan kualitas air sungai, kedalaman dan kedalaman air tanah, intensitas curah hujan, dan iklim.

Diketahui bersama pengelolaan jaringan hidrologi secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh berbagai lembaga terkait. Informasi sumber daya air terkait dengan hidrologi merupakan masukan yang sangat penting bagi pengambil keputusan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh bencana yang terkait dengan air.

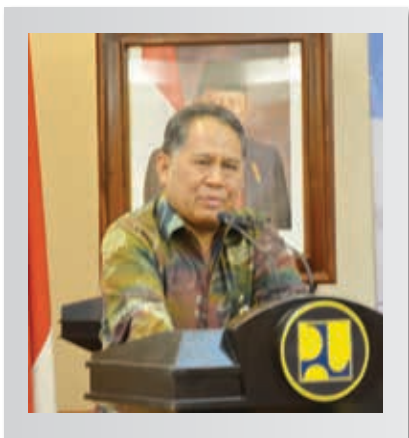
Djoko Kirmanto berharap seminar ini dapat menjadi ajang pembahasan dan diskusi untuk memperoleh keakuratan dan kecepatan informasi tentang hidrologi dalam menghadapi prakiraan bencana terkait air dan iklim ekstrem yang mungkin terjadi dalam rangka



menunjang pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan Pengukuhan Pengurus MHI Periode 2013–2016 dan pelantikan pengurus baru MHI.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan, dan Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Air, Bambang Hargono. *(idr/anj)*



SOSIALISASI *TOOLBOX* IWRM (*INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT*) KEMITRAAN AIR INDONESIA (KAI) DAN PENINGKATAN KAPASITAS *WEBSITE* KAI



Global Water Partnership (GWP) Integrated Water Resources Management (IWRM) Toolbox adalah langkah pertama dalam membangun jaringan informasi dan ide untuk memperkuat gerakan global IWRM. *IWRM Toolbox* merupakan media di mana para praktisi IWRM dari seluruh dunia dapat berbagi pengalaman dan pelajaran. Tujuan dari *Toolbox* ini sendiri adalah untuk menggabungkan pengalaman global para praktisi pemangku kebijakan, akademisi dan ahli ke dalam suatu media yang dapat diakses untuk mendukung pengembangan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengarah Kemitraan Air Indonesia (KAI), Achmadi Partowijoto, yang mewakili Ketua Badan Eksekutif KAI, Moch. Amron, dalam acara Sosialisasi *Toolbox IWRM (Integrated Water Resources Management)* Kemitraan Air Indonesia (KAI) dan Peningkatan Kapasitas *Website* KAI di Jakarta (18/12).

Lebih lanjut, dipaparkan bahwa IWRM *Toolbox* merupakan kumpulan pengalaman pelaksanaan IWRM secara nyata dari berbagai penjuru dunia. "Pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran yang sangat diperlukan untuk peningkatan pengelolaan sumber daya air di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang dijiwai oleh pendekatan IWRM. Pengelolaan sumber daya air perlu bercermin pada contoh-contoh kasus penerapan IWRM yang terjadi selama ini di segala penjuru dunia," ujar Achmadi Partowijoto.

Dalam sosialisasi ini para peserta dibekali pengetahuan manajemen dan teknik penggunaan perangkat dan instrumen IWRM *Toolbox*. Sosialisasi dilakukan dengan cara studi kasus secara langsung, di mana para peserta mengemukakan kasus sumber daya air terkait dengan bidang tugas masing-masing sehingga peserta dapat memahami hasil-hasil aplikasi pengelolaan sumber daya air yang telah dirasakan oleh para *stakeholder* dan



mengimplementasikan kasus tersebut sehingga dapat diakses masyarakat umum melalui *website*. Dengan demikian peserta sosialisasi dapat menjelaskan permasalahan IWRM yang dihadapi, tindakan yang dilakukan, hasil, serta hikmah dan pelajaran yang

dapat diambil. Peserta sosialisasi berasal dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Kegiatan sosialisasi ini sendiri didanai oleh *Global Water Partnership* yang merupakan organisasi induk dari KAI. (*idr*).



DELEGASI APEC SUMMIT 2013

KUNJUNGI PROYEK PENGAMANAN PANTAI DI BALI



Empat delegasi Pertemuan APEC Bali 2013 dari negara-negara Asia-Pasifik di sela-sela kesibukan pertemuannya, berkesempatan mengunjungi proyek Pengamanan Pantai Bali yang berlokasi di pantai Nusa Dua, Tanjung Benoa, Selasa (08/10).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Kiribati beserta beberapa menterinya, Perdana Menteri Solomon Island, Menteri Luar Negeri Fiji dan Duta Besar Marshall Islands untuk Indonesia, diterima oleh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam kunjungannya tersebut, para delegasi mendapat penjelasan singkat diantaranya mengenai kondisi Pantai Bali secara umum, peranan pantai dalam mendukung sektor pariwisata yang memberikan kontribusi sebesar 80% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali, serta aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan sarana pengamanan pantai. Dalam kesempatan yang sama, para delegasi juga melihat secara langsung infrastruktur yang telah terbangun di pantai Nusa Dua.

Proyek penanganan Pantai Nusa Dua Tanjung Benoa telah terbukti memberi kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat

dan Bali secara umum. Wilayah ini telah berkembang menjadi tempat wisata yang bergengsi dengan hotel-hotel berbintang, restoran ternama, tempat olahraga air terkemuka, dan konservasi penyu. Sekarang proyek ini memasuki fase kedua, yang mencakup kegiatan *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) dalam *monitoring* dan *maintenance* pantai.

Sebagai negara-negara kepulauan, delegasi menunjukkan antusiasme atas kunjungan ini dan memberi tanggapan positif atas pengalaman yang dibagikan oleh tuan rumah. Beberapa delegasi mengharapkan dapat menjalin kerjasama dalam bidang penanganan dan pengamanan pantai. **(Datin SDA)**



PENYERAHAN SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DI LINGKUNGAN DITJEN SUMBER DAYA AIR



"Memerlukan komitmen, konsistensi dan upaya yang sungguh-sungguh dalam merubah sikap perilaku menuju terwujudnya budaya mutu," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan dalam acara Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (25/11), Jakarta.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kualitas. Hal ini karena ISO menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk suatu desain dan atau penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan/karakteristik yang telah ditentukan.

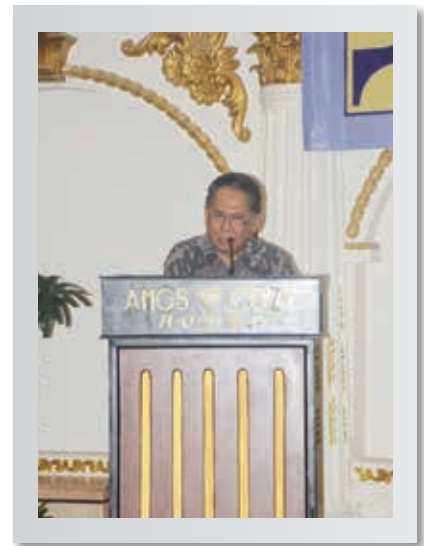
Berkaitan dengan hal tersebut, Subdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program yang telah bersertifikat ISO 9001:2008 melakukan pembinaan dan *monitoring* Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) seluruh BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), di mana dalam tahun anggaran 2013, sebanyak 4 Unit Pengelola telah berhasil memperoleh ISO 9001:2008, yaitu Unit Pengelola SISDA BBWS Brantas, BBWS Pompengan Jeneberang, BWS Nusa Tenggara I dan BBWS Cimanuk Cisaranggung.

Penerapan sistem ini bermanfaat agar terciptanya pelayanan prima,

efisiensi, kepastian mutu pelayanan dan transparansi, yang kesemuanya merupakan pilar dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Moch. Hasan, “evaluasi dan tinjauan manajemen mutu diperlukan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektif dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu”.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Ditjen SDA, Mudjiadi, Direktur Bina Program, Hasanudin, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ari Setiadi, serta perwakilan BBWS/BWS. **(dew/tin)**



KAMPANYE PEDULI AIR

BERSAMA MENJAGA SUNGAI



Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), melaksanakan Pameran 25 karya foto terbaik lomba foto "Bersama Menjaga Sungai", sekaligus memberikan informasi langsung ke masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memberikan informasi, serta mempublikasikan kepada masyarakat berbagai hasil pembangunan infrastruktur SDA. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk booth pameran yang berfungsi sebagai information desk dan bertempat di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Desember 2013.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini secara kontinu, diharapkan partisipasi publik untuk turut menjaga kelestarian sungai dapat meningkat, terutama bagi masyarakat di perkotaan yang sering terkena imbas bencana banjir. Hal lain dari tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperoleh pandangan kritis dan input obyektif dari masyarakat tentang kinerja Kementerian Pekerjaan Umum. **(nan/anj/ech)**

